

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia pariwisata merupakan suatu hal yang memiliki pengaruh penting dalam perkembangan dan pembangunan suatu Negara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan serta pengembangan dalam sektor pariwisata di berbagai wilayah di Indonesia. Sektor pariwisata dikembangkan karena dianggap menjadi sumber industri andalan yang dapat memberikan lapangan pekerjaan, menguntungkan masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta, serta menggeser kegiatan-kegiatan industri manufaktur dan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat mengeksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu pengembangan di sektor pariwisata gencar dilakukan di berbagai wilayah Indonesia saat ini.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata merupakan kegiatan wisata yang didukung layanan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Dampak pariwisata sebagai suatu bisnis adalah memberikan pengaruh terhadap sosial ekonomi sekitar. Tingginya kunjungan masyarakat luar daerah membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Daerah tujuan wisata merupakan salah satu komponen penting sumber daya pariwisata. Faktor geografi merupakan faktor penting untuk pertimbangan pengembangan kepariwisataan. Pendekatan geografi yang mendasarkan pada aspek keruangan mempunyai kaitan yang erat dengan persebaran dari suatu obyek pembahasan. Pengembangan pariwisata yang menggunakan pendekatan keruangan dapat dilihat dari kedudukan obyek wisata

terhadap obyek wisata yang lain, hal ini dimaksudkan untuk melihat potensi yang dimiliki obyek wisata dan adanya kemungkinan untuk dikembangkan atau berkembang.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Jambi, dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. untuk mengarahkan pembangunan di Kota Jambi dengan memanfaatkan wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kepariwisataan tidak akan terlepas dari unsur fisik dan nonfisik. Unsur-unsur fisik dan nonfisik tersebut akan menjadi pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan daya dukung obyek dan pertimbangan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata harus didasarkan pada perencanaan, pengembangan, dan arah pengelolaan. Pengembangan pariwisata secara sistematis dan arah pengelolaan itu sendiri sangat membutuhkan perhatian pemerintah, sebagaimana tercermin dalam pembentukan atau pengakuan terhadap Organisasi Pariwisata Nasional. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata, diantaranya merumuskan kebijakan dalam pengembangan pariwisata dan berperan sebagai alat pengawasan kegiatan pariwisata sehingga diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah tujuan wisata. Jambi merupakan sebuah provinsi yang berada di pulau Sumatera, Jambi juga terkenal dengan mempunyai banyak tempat-tempat menarik dan indah, salah satunya adalah Danau Sipin, Danau Sipin adalah sebuah danau yang terletak di

tengah-tengah Kota Jambi. Tidak banyak ibu kota provinsi, bahkan kota-kota besar di Indonesia yang memiliki potensi alam danau di pusat kotanya.

Di kawasan Danau Sipin kita bisa melihat pemandangan aktivitas warga yang sedang mengelola keramba ikannya, di tengah danau sendiri terdapat banyak keramba ikan milik warga sekitar, disekitarnya juga terdapat rumah panggung yang biasa digunakan untuk beristirahat para pencari ikan, tak hanya itu, Danau Sipin juga menawarkan pemandangan sunset yang indah. Akses menuju Danau Sipin tidaklah sulit karena lokasinya yang berada di tengah Kota, bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum, Danau Sipin adalah salah satu objek wisata yang harus dikunjungi saat berlibur di Kota Jambi.

Danau Sipin pasti menjadi sangat menarik, jika dikemas begitu rupa. Pemerintah Kota Jambi, yang di dukung dengan Komitmen Wali Kota Jambi, H. Syarif Fasha akan menjadikan kawasan Danau Sipin sebagai perpaduan antara kawasan wisata budaya dan alam andalan di Kota Jambi. Pembangunan tahap pertama dilaksanakan untuk pembangunan *joging track* sepanjang 480 meter, taman, fasilitas parkir, dan fasilitas toilet. Kedepannya akan memadukan alam yang indah dan unik dengan kearifan lokal budaya Kota Jambi. Transportasi perahu tradisional akan tetap dipertahankan walaupun kawasan ini kedepan akan menjadi *Water spot* di Kota Jambi. Didekat kawasan ini juga sudah kita bangun rumah tenun dan batik yang akan menambah daya tarik dan kekhasan wisata Danau Sipin dan taraf ekonomi masyarakat sekitar juga akan terangkat. Proses pengembangan produk baru dapat didefinisikan sebagai pengertian revitalisasi dapat diartikan menghidupkan kembali suatu kawasan yang sudah mati,

meningkatkan kawasan yang sudah hidup, dengan adanya revitalisasi yang dilakukan dengan objek wisata Danau Sipin, maka yang diharapkan kawasan tersebut seakan siap memanjakan pengunjung¹.

Perubahan rezim politik di Indonesia telah mengubah struktur isentif dalam politik lokal. Respon pemerintah lokal bervariasi dalam menanggapi menguatnya politik desentralisasi. Pemahaman yang salah tentang politik keuangan daerah membawa sebagian pemerintah lokal untuk menciptakan berbagai pajak daerah dan prosedur pelayanan rumit yang pada gilirannya menjadi arena baru korupsi pemerintah lokal². Namun tidak sedikit pemerintah lokal memanfaatkan celah otonomi untuk membuat terobosan kebijakan yang mengubah total pola pengelolaan pemerintah lokal dalam penyediaan pelayanan publik penciptaan lingkungan pelayanan yang lebih responsif dan efisien.

Dalam konteks ini, infrastruktur budaya serta festival budaya menjadi katalis bagi penciptaan lapangan kerja dan revitalisasi wilayah perkotaan. Pada dasarnya penggunaan pendekatan budaya merupakan bagian dari strategi kota *entrepreneurial* dalam konteks persaingan global. Strategi pembangunan kota berbasis budaya sebetulnya bukan sesuatu yang baru dan telah menjadi bagian penting dari pembangunan kota di berbagai belahan dunia. Meskipun pendekatan budaya dilakukan di berbagai wilayah secara luas, namun tiap-tiap daerah memiliki pendekatan dan strategi pembangunan berbasis budaya yang berbeda.

¹ Muhammad Ikhsan, Ade Perdana Siregar, *Peran Preferensi Memediasi Pengaruh Revitalisasi Produk Wisata Terhadap Keputusan Berkunjung Objek Wisata Danau Sipin Jambi*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4, No.1 Tahun 2020), hlm. 101-102.

² Kementrian Keuangan, *UU No.18 1997 yang direvisi dalam UU No. 34 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah*. diunduh dari www.djpk.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 27 juli 2020.

Proyek-proyek budaya telah menjadi bagian penting dari *branding* kota, dan menjadi strategi kunci untuk menarik investasi. Menurut Miles keberhasilan dari pembangunan budaya di perkotaan terletak pada apakah proyek-proyek budaya dapat terhubung dengan perasaan memiliki (*sense of belonging*) dari masyarakat terhadap lokasi atau peristiwa tertentu³. Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan Kota sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi, kebudayaan, mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga dan kelompok maupun secara institusional yang lebih luas berpegang teguh dan terikat pada nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat serta perundang-undang yang berlaku.

Danau-danau yang ada diwilayah Kota Jambi seluruhnya terbentuk secara alami diantaranya Danau Sipin memiliki pemandangan panorama yang khas, dengan deretan perumahan khas Melayu Jambi. Danau Sipin pada hakikatnya termasuk kategori Danau Laguna karena permukaan airnya dipengaruhi sungai batang hari melalui anak sungai Legok sebagai penghubungnya. Objek wisata Danau Sipin merupakan satu potensi Kota Jambi kawasan Danau Sipin dan Kecamatan Telanaipura tepatnya dikelurahan Legok, Kelurahan Sungai Putri, Kelurahan Tenalaipura, dan Kelurahan Buluran. Kawasan Danau Sipin memiliki panjang 4.500 meter dan lebar rata-rata sekitar 300 meter lebih dengan kedalaman 2-6meter⁴.

³ Priyanto Harsasto, *Strategi Pembangunan Kota Berbasis Budaya Revitalisasi Pasar Gede di Kota Surakarta*, (Jurnal Ilmu Politik, Vol.9, No. 1. Tahun 2019), hlm.35.

⁴ Syarif Abdullah, Dodi Saputra, *Danau Sipin, Bakal Jadi Tujuan Wisata Alam Khas Jambi*, diunduh dari www.antaraneews.com, diakses pada tanggal 13 Juli 2020.

Danau Sipin memiliki lokasi yang strategis ditengah Kota Jambi, prasarana pendukung jalan yang memadai dan potensi ketersediaan lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam dan buatan serta memiliki keunikan Melayu Jambi berupa rumah-rumah panggung disekitar Danau dan Makam Raja-Raja dan Sultan Jambi serta peninggalan atau situs bersejarah lainnya yang tersebar dan sebagian besar belum terkelola dengan baik. Dengan panorama alam yang indah dan kondisi air yang cukup tenang dan serta bentuk Danau yang panjang melingkari pulau sipin, alam di sepanjang Danau Sipin masih terlihat alami yang ditumbuhi semak belukar dengan pohon-pohon yang rimbun. Pada beberapa sisi danau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keramba ikan, sisi lainnya merupakan lokasi latihan atlet dayung cabang olahraga ini telah mengharumkan Kota Jambi kedunia Internasional melalui kejuaraan perahu Naga di Malaysia, Hongkong, dan China⁵.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Annisa Suciati yang berjudul Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat Implementasi perda No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah dikota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu. Bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik dan partisipasi masyarakat di Kota Bekasi Sumur Batu menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Sumur Batu sangat terbantu dengan adanya kebijakan publik dari pemerintah tersebut karena masalah sampah yang susah untuk dikendalikan.

⁵Susandijani, *Danau Sipin Tujuan Wisata Baru di Kota Jambi*, diunduh dari www.travel.tempo.com, diakses pada tanggal 13 Juli 2020.

Lingkungan Hidup Kota Bekasi kepada Masyarakat mengenai pengelolaan sampah perlu ditingkatkan kembali agar sosialisasi tersebut dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tidak hanya penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah konsep 3R. Dinas lingkungan Hidup Kota Bekasi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bank sampah. Selain sosialisasi bank sampah kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi juga telah mensosialisasikan alur pengelolaan sampah yang ramah lingkungan berupa pamflet yang ada di setiap Kecamatan.

Dalam mengimplementasi kebijakan tidaklah mudah, karena setiap kebijakan akan sulit diimplementasikan apabila sarannya mencakup semua masyarakat, terutama jika melihat wilayah Kota Bekasi yang cukup luas dan terbagi dalam 12 kecamatan. Salah satu penyebab jumlah sampah meningkat yang terjadi di Kota Bekasi karena mereka sulit untuk diajak bekerja sama dalam menangani permasalahan sampah. Sebaliknya sebuah program akan mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sarannya tidak terlalu besar⁶.

Konsep 3R adalah *Reduce, Reuse, Recycle*. *Reduce* berarti kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. *Reduce* juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang anda tidak terlalu butuhkan seperti baju baru, aksesoris tambahan atau apapun intinya adalah pengurangan kebutuhan.

⁶ Annisa Suciati, *Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat Implementasi perda No.15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bekasi TPA Batu*. (Skripsi, Fakultas UIN Hidayatullah, 2017), hlm. 5-6.

Reduce adalah masyarakat diajak untuk sebisa mungkin mengurangi kebutuhan sampah dari rumah.

Reuse adalah memakai kembali atau mengusahakan agar barang- barang yang masih bisa dipakai, tetapi sudah tidak diinginkan lagi, dijual ke orang lain. Artinya selain itu adalah memakai barang yang sudah tidak diperlukan lagi dengan fungsi yang lain. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang *disposable* sekali pakai, buang. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.

Recycle adalah mendaur ulang barang. paling mudah adalah mendaur ulang sampah organik dirumah, menggunakan bekas botol plastic air minum atau apapun sebagai pot tanaman, sampai mendaur ulang kertas bekas untuk menjadi kertas kembali. Daur ulang secara besar besaran belum menjadi kebiasaan diindonesia. Tempat sampah yang membedakan antara organik dan non organik saja tidak jalan. Maka akhirnya lebih banyak gerilyawan lingkungan yang melakukan daur ulang secara kreatif dan menularkannya pada banyak orang dibandingkan Pemerintah⁷.

Penelitian selanjutnya Dita Andini yang berjudul Revitalisasi Objek Wisata Taman Balekambang Kota Surakarta Pembangunan daerah merupakan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah melalui proses pendayagunaan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan segala urusan

⁷Annisa Nur Farida, *3R Reduce, Reuse, Recycle*, diunduh dari www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 06 Juli 2020.

pemerintahan di daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan ekonomi daerah.

Keinginan tersebut tidak terlepas dengan adanya potensi budaya dan pariwisata yang dimiliki Kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki banyak potensi budaya baik berupa artefak, metafak dan sosiofak, serta potensi pariwisata yang berupa obyek daya tarik wisata budaya, wisata belanja, wisata kuliner dan wisata pendidikan.

Kota Surakarta sebagai Kota Budaya dan Kota Pariwisata, kaya akan peninggalan budaya baik yang berupa artefak seperti bangunan cagar budaya antara lain Keraton Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran. Peninggalan Sosiofak seperti Tradisi Sekaten, Malam Selikuran dan Kirab Pusaka Keraton setiap 1 Syuro, maupun metafak seperti laku spiritual kejawen. Selain itu peninggalan budaya yang Adiluhung berupa Tata Krama, Bahasa Jawa, Seni Tari, Kerajinan Batik dan Busana Jawa telah memberikan andil besar dalam kasanah budaya bangsa kita. Maksud kegiatan penataan dan revitalisasi kawasan adalah untuk meningkatkan aktivitas dan kenyamanan lingkungan yang dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokalnya.

Revitalisasi Taman Balekambang merupakan salah satu perwujudan kebijakan strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta Tahun 2005-2010 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan

Kepariwisata Kota Surakarta Tahun 2005-2010, memiliki visi Sebagai fasilitator terdepan dan profesional dalam upaya pengembangan dan pembinaan pariwisata seni dan budaya untuk mewujudkan kota Surakarta sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia tahun 2010⁸.

Masalah sebelum revitalisasi danau sipin, Tahun 2019 dilakukan pembersihan dikawasan Danau Sipin pengangkatan gulma dan eceng gondok terjadi pengikisan di Danau Sipin disebabkan globalisasi ada banyak juga sampah berserakan sebelum dilakukan revitalisasi. Pengembangan Danau Sipin dimulai pada tahun 2017 dengan pembangunan jogging track sepanjang 480 meter dibandaran objek wisata dengan mengeluarkan dana APBD Kota Jambi sebesar 3.5 Miliar. Pada Tahun 2018 Walikota Jambi selain melanjutkan pembangunan arena jogging juga akan dibangun jembatan penghubung dan kios UMKM untuk cenderamata dan kuliner, serta normalisasi kawasan danau supaya objek wisata ini juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Danau Sipin di Kecamatan Telanaipura sebelumnya tidak dikelola dengan baik. Disana belum tersedia fasilitas rekreasi sehingga masyarakat belum menjadikan tujuan wisata. Danau Sipin merupakan danau alami yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum Kota Jambi. Masyarakat yang tinggal di kawasan Danau itu masih ada yang memanfaatkan untuk budidaya keramba ikan⁹.

⁸ Dita andini, *Revitalisasi Objek Wisata Taman Balekambang Kota Surakarta*, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), hlm.13.

⁹Yudha Manggala P Putra, *Danau Sipin Wisata Alam Khas Jambi*, diunduh dari www.republika.com, diakses pada tanggal 08 Juli 2020.

Alasan dilakukan revitalisasi Danau sipin, karena sangat jarang di suatu Provinsi memiliki Danau yang sangat indah. Kota jambi termasuk Kota yang beruntung memiliki Danau Sipin.Sangat disayangkan kalau Danau Sipin tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Kota Jambi, karena itu pemerintah Kota Jambi pada tahun 2019 mengeluarkan dana APBD 13 Miliar untuk merevitalisasikan objek wisata Danau Sipin, H Bakhri mengungkapkan Danau Sipin adalah suatu *icon* pariwisata di Kota Jambi¹⁰. Guna revitalisasi Danau Sipin diharapkan untuk menjadi objek wisata andalan Kota Jambi yang mana akan sangat membantu perekonomian di daerah tersebut, pemerintah yang melakukan revitalisasi Danau Sipin ini, masyarakat disana berharap Danau Sipin menjadi ladang baru untuk mencari nafkah di kawasan sekitar Danau Sipin, karena mayoritas masyarakat disana hanya bergantung pada hasil panen keramba ikan dikawasan tersebut.

Secara spiritual masyarakat disana juga sudah mulai meninggalkan kegiatan negatif.Dahulu Danau Sipin dikenal sebagai kampung narkoba, namun perlahan-lahan *image* tersebut mulai luntur.Hal ini akibat perhatian pemerintah.Sebelumnya, faktor ekonomi yang menjadikan faktor penyebab masyarakat disana berperilaku negatif, seperti menjual dan memakai narkoba¹¹.

Kebudayaan lahir dan berkembang dalam sistem kehidupan masyarakat. Ada berbagai macam definisi tentang kebudayaan. Mulai dari buah dari pemikiran

¹⁰Ikbal Ferdial, Revitalisasi *Danau Sipin H Bakhri Pusat Kucurkan Dana Sebesar 19,5 Miliar*, diunduh dari www.metrojambi.com, diakses pada tanggal 06 Juli 2020.

¹¹Admin Pemerintah Kota Jambi, *Walikota Siap Angkat Potensi Wiasata Danau Sipin Menjadi Wisata Andalan Kota Jambi*.Diunduh dari www.jambikota.co.id, diakses pada tanggal 06 Juli 2020.

manusia hingga ciptaan hidup dari suatu bangsa. Ilmu seputar kebudayaan dan perilaku manusia dipelajari dalam antropologi. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh dengan cara belajar¹²

Menurut Edward Burnett Tylor budaya adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat¹³.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul. **“Politik Kebijakan Publik Berbasis Budaya Revitalisasi Danau Sipin Sebagai Strategi Pembangunan Kota “.**

¹²Teddy Sutardi, *Antropologi mengungkap keragaman budaya*, (Bandung: Setia Purnama Inves, 2007), hml. 10-11.

¹³<http://detik.com>/pengertian kebudayaan menurut para ahli diakses pada tanggal 25 November 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan masalah berikut :

1. Bagaimana strategi aktor politik dalam implementasi pembangunan kota melalui revitalisasi danau sipin ?
2. Bagaimana dampak revitalisasi terhadap konflik kepentingan masyarakat Kota Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi aktor politik dalam implementasi pembangunan kota yang dilakukan Pemerintah Kota melalui revitalisasi Danau Sipin.
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak revitalisasi terhadap masyarakat Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti dapat menambah pengetahuan tentang Politik Kebijakan berbasis Budaya Revitalisasi Danau Sipin sebagai strategi pembangunan Kota.
2. Bagi masyarakat dapat mendapat pengetahuan mengenai alasan pemerintah melakukan Revitalisasi di Danau Sipin.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Politik Kebijakan

Menurut Noam Chomsky, seorang filosofi ternama dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), mengatakan bahwa politik dan kebijakan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Dimana ada kebijakan, maka disitulah terdapat kekuatan politik, kepentingan, dan aktor politik yang “bekerja” dan membentuk interseksi, atau bahkan terkadang persinggungan yang berujung pada konflik. Dengan demikian, setiap kebijakan sebetulnya tidaklah bersifat benar-benar netral¹⁴.

Eksistensi sisi politisi dari sebuah kebijakan itu yang pada praktiknya mewarnai kehidupan manusia dimanapun mereka tinggal dan berada. Selain itu juga hubungan antara politik dan kebijakan ada pada kepentingan itu dan tak jarang antara *politicis* dan *policy goals* merupakan dua hal yang berbeda. Politik berbicara tentang tujuan seperti memperjuangkan nilai dan jabatan (*offices*) berhadapan dengan lawan politik, sementara kebijakan bertujuan untuk menghasilkan solusi terhadap masalah yang perlu mendapat dukungan dari pihak yang terkena dampak dari kebijakan tersebut¹⁵.

1.5.2 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*Policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program keputusan, undang-

¹⁴Pengantar Redaksi, *Politik dan Kebijakan*, (Jurnal Politik: Vol. 3, No 1, Agustus 2017), hlm 01.

¹⁵*Ibid*, hlm 2.

undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy maker*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan¹⁶.

Kebijakan yang dikemukakan oleh Wiliam N. Dunn adalah proses atau aktivitas yang dilakukan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut waktu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penelitian kebijakan. Ini dilakukan agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dari masalah yang ada¹⁷.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

William N Dunn menyatakan bahwa dalam proses analisis kebijakan publik dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

¹⁶ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), hlm 20.

¹⁷ Wiliam N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta. Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 22

1. Merumuskan Masalah
Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.
2. Peramalan Masa Depan
Peramalan atau *Forecasting* adalah suatu prosedur dalam membuat informasi factual tentang masalah kebijakan untuk dapat mengetahui tindakan apa yang dilakukan kedepan sebagai akibat dari alternative yang dikemukakan.
3. Rekomendasi Kebijakan
Dunn menyatakan, prosedur dari analisis kebijakan publik dari rekomendasi memungkinkan dan menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan kosekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya.
4. Pemantauan Hasil Kebijakan
Pemantauan hasil kebijakan atau *monitoring* merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberi informasi tentang sebab akibat kebijakan publik.
5. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan¹⁸.

William N Dunn sebagaimana dalam bukunya Hasel Nogi S. Tangkilisan menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan bagian dari proses analisis kebijakan. Dunn mengembangkan 3 pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi teoritis. Semua evaluasi tersebut merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informan yang valid dan dapat dipercaya mengenai

¹⁸*Ibid*, hlm, 95

hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai-nilai dari hasil target kebijakan¹⁹.

Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu :

1. Tujuan yang akan dicapai. Hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks

¹⁹Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Balaiarung & CO, 2003,) hlm. 79.

5. sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis²⁰.

1.5.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, implementasi kebijakan bermuara kepada *output*, baik kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dirasakan oleh pemanfaat. Tahap implementasi berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan kewenangan pada suatu kebijakan dengan membentuk *output* yang jelas dan dapat diukur, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil melalui kegiatan program pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks. Van Meter dan Van Horn, dalam Leo Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digambarkan dalam keputusan kebijaksanaan²¹.

²⁰AG. Subarsono, “*Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 6-8.

²¹Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabet Bandung, 2014), hlm. 138-139.

Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran itu sendiri. Proses kebijakan secara keseluruhan dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Maka dari itu keberhasilan mengimplementasikan kebijakan publik sangat tergantung pada keberhasilan mengidentifikasi jejaring kerjasama antara aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik itu, karena akhirnya aktor itulah yang melaksanakan apapun kebijakan publik yang dibuat²².

Mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor pendukung atau bahkan faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan publik tersebut. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka George C. Edward III sebagaimana dalam Arifin Tahir, menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yakni komunikasi (*Communication*), Sumber daya (*Resourches*), Sikap pelaksana (*Dispottition or Attitudes*), Struktur birokrasi (*Bereaucratic structure*)²³.

1. Komunikasi (*Communication*)

Faktor komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang

²² Djaja Saefullah, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), hlm.15.

²³ Arifin Tahir, *Op cit*, hlm. 61.

dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tetap dan konsisten. Salah satu syarat utama agar implementasi kebijakan berjalan secara efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksana.

2. Sumber daya (*Resourcrches*)

Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara ntuk mengimplementasikan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang terlibat didalam implementasi. Kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan faisilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau memberikan pelayanan.

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. Staf, diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, yaitu dalam mengimplementasikan kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data keutuhan dari pelaksanaan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

- c. Wewenang, yaitu otoritas atau legislatif bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan secara politik.
- d. Fasilitas, yaitu fasilitas fisik juga merupakan faktor penting implementasi kebijakan.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan, karena bagaimanapun juga para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif²⁴.

3. Sikap pelaksana (*Disposition*)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri.

Hal penting yang perlu dicermati pada faktor disposisi menurut George C Edward III adalah :

²⁴*Ibid*, hlm.67.

- a. Pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Instensif, pada umumnya orang yang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi instensif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan²⁵.

Jika para pelaksana mendapat disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya diluar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat kebijakan. Proses implementasi kebijakan menjadi secara tak terbatas lebih membingungkan.

1.5.4 Strategi Pengembangan Pembangunan

Strategi Pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi pemerintah menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi pemerintah secara sinergi dan efisien.

a. Macam-Macam Strategi Pembangunan

1). Strategi Pertumbuhan

²⁵*Ibid*, hlm.70.

Strategi Pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.

2). Strategi Dengan Pemerataan

Inti dari konsep ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik *social engineering*, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

3). Strategi Ketergantungan

Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari strategi pembangunan ketergantungan adalah kemiskinan di negara–negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya.

4). Strategi Yang Berwawasan Ruang

Strategi ini di kemukakan oleh Myrdall dan Hirsman yang mengatakan :Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan atau pengaruh menyeter dari kaya ke miskin *Spread Effect* lebih kecil dari pada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya *Back Wash Effect*.

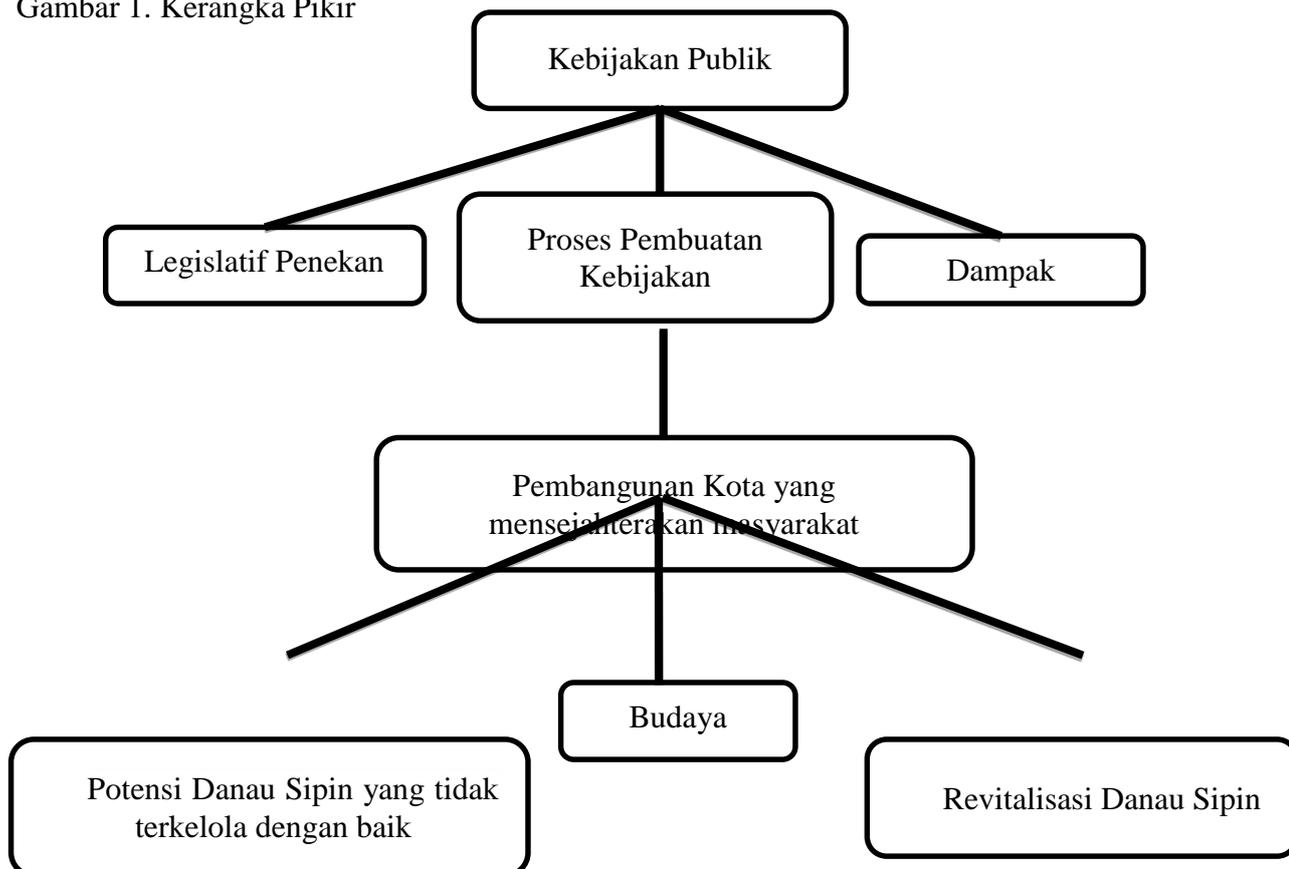
5). Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya²⁶.

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir berarti menyusun langkah-langkah sistematis dalam mengelola konsep-konsep kedalam proses penteorian yang akan dibuat dalam sebuah penelitian. Misalnya ada pendekatan, penentuan konsep atau teori-teori apa yang akan digunakan dan sampai kepada proses analisis dan simpulan penelitian²⁷.

Gambar 1. Kerangka Pikir



²⁶<https://Dewinatorika96.blogspot.com/Strategi-Pembangunan.html> diakses pada tanggal 09 Juli 2020.

²⁷Ikbar Yanuar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2012), hlm. 96.

Yang dimaksud legislatif penekan disini adalah pemerintah Kota Jambi, yaitu walikota Jambi yang mana mengeluarkan suatu kebijakan publik, dan diproses menjadi sebuah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi, dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Yang mana sebuah kebijakan berdampak kepada masyarakat sekitar ataupun masyarakat umum kemudian menjadikan masyarakat yang sejahtera, karena dahulu disana masyarakatnya belum sejahtera, dan masyarakat disana belum mengelola dengan baik. Maka dari situlah pemerintah melihat adanya potensi pariwisata di tengah-tengah kota, Walikota H. Syarif Fasha membuat sebuah kebijakan untuk merevitalisasikan Danau Sipin tanpa mengubah budaya dan alami danau tersebut.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atas isu dan dikatakan “Bertahap” karena kegiatan ini berlangsung mengikuti proses tertentu sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya. John Creswell yang dikutip oleh J.R. Raco mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang diteliti²⁸.

²⁸JR.Raco, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2012) hlm 3-6.

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi²⁹.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Danau Sipin Kota Jambi yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Kecamatan Telanai Pura. Secara temuat yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian Danau Sipin Kota Jambi bertujuan untuk mengetahui dampak revitalisasi Danau Sipin yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat sekitar, pengunjung yang berada di wisata Danau Sipin dan pemerintah Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan lebih memfokuskan pada revitalisasi Danau Sipin sebagai pembangunan Kota serta dampak perekonomian masyarakat di sekitar.

²⁹Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta 2015) hlm 9.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling* yang menurut Sugiyono adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu³⁰.

Untuk teknik *purposive sampling* terdiri dari Dinas Tata Kota, PUPR, Dinas Pariwisata, Bappeda, dan Masyarakat. Alasan menggunakan teknik tersebut ialah untuk sementara penulis membutuhkan data dari beberapa orang tersebut selanjutnya akan berkembang sesuai dengan jalannya penelitian. Adapun informan dari penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 1.
Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1.	Nujjumudin	Kabid PJU Dinas Perkim
2.	Dwi Cahyo	Kepala seksi bidang pembangunan kota PUPR
3.	Sri PurnamaSyam	Kepala Dinas Pariwisata
4.	Chairul Yuda	Sekretaris Bidang Keuangan BAPPEDA

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2016), hlm. 85.

5.	Ilham Miko	Masyarakat Sekitar Lokasi
6.	Muhammad Yanto	Pedagang Sekitar Lokasi
7.	Rachman	Penyedia Kapal Sekitar Lokasi
8.	Nurlia	Pedagang Sekitar lokasi
9.	Dani	Masyarakat Sekitar Lokasi
10.	Ardi	Ketua RT 05 Sungai Putri

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen³¹. Sumber data primer yang dimaksud berupa data-data yang diperoleh melalui wawancara langsung

³¹*Ibid*, hlm. 225

terhadap instansi yang terlibat selaku informan serta data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan cara observasi pada lokasi yang telah ditentukan. Sedangkan Data sekunder yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah data yang telah terdokumentasi seperti berita-berita maupun laporan-laporan yang berhubungan dengan Revitalisasi Danau Sipin Sebagai Strategi Pembangunan Kota. Dalam penelitian kali ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah :

1). Wawancara

Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancara.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data informasi secara mendalam mengenai upaya Revitalisasi Danau Sipin Sebagai Pembangunan Kota. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

2). Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal berupa notulen, foto, agenda dan sebagainya³².

3). Metode Kepustakaan

³²*Ibid* hlm 65.

Yaitu cara pengumpulan data dengan membaca, menelusuri serta menelaah buku buku sebagai referensi dan menggali teori teori yang berkembang dan menghubungkannya dengan penelitian sehingga dipercaya kebenarannya.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk memperoleh data akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian. Ada tiga tahapan dalam menjelaskan analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini³³.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian dalam bentuk tulisan dan table, dengan melakukan penyajian data dapat memberikan gambaran secara menyeluruh,

³³*Ibid.*

sehingga memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan dan melakukan analisis. Pada tahap penyajian data ini penulis berusaha menyimpulkan kembali data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi data sebelumnya. Agar didapat data-data yang lebih akurat, data-data dikelompokkan kedalam table, table ini membantu peneliti memberikan kesimpulan. Data yang disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian³⁴.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Dalam kegiatan penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data. Namun, kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat saja melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali di lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya³⁵. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, maka akan di peroleh kesimpulan yang bersifat

³⁴*Ibid.*

³⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Editor: Wibi Hardani, Edisi Kedua, (Jakarta : Erlangga, 2009), hlm 147.

“grounded” yang artinya “teori” yang dikembangkan tersebut muncul dari bawah ke atas dan dibangun dengan bukti atau data yang saling berhubungan³⁶.

1.7.7 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi adalah uji kredibilitas data kualitatif dengan cara menilai kecukupan data sesuai dengan konvergensi beberapa sumber data atau beberapa teknik pengumpulan data³⁷. Dengan demikian triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

³⁶Fernandes Simangunson, *Metode Penelitian Pemerintahan*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm 191.

³⁷Wiliam Wiersma dalam Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 273.